

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
Mega setiawan, S.H



# IMPLEMENTASI PP. NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN WARALABA

Studi pada  
Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan  
Kota Bandar Lampung.



Penerbit:  
Arjasa Pratama

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Mega setiawan, S.H

# **IMPLEMENTASI PP. NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN WARALABA**

(Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota  
Bandar Lampung)

**Penerbit:  
Arjasa Pratama**

# **Implementasi Pp. No. 42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba**

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Mega setiawan, S.H

Pemindai Aksara : M.Ulil Hidayat

Penyunting : Khoirul Wildan

Desain Cover : Rico Dia Putra

**Penerbit:**

**Arjasa Pratama**

Jl. P Tirtayasa, Gang P.Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung.

cvarjasapratama@gmail.com | 0721-5640386

Anggota IKAPI Jakarta

www. arjasapratama.com

cetakan pertama : November 2020

## **Sanksi Pelanggaran**

### **Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

#### **Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**ISBN :978-623-95220-7-0**

Dicetak oleh Percetakan CV. Arjasa Pratama, Bandar Lampung

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah* atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah swt limpahkan kepada kami dan kita semua, dan atas selesainya karya ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami dan kita semua Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. Dengan harapan kita semua mampu dijadikan sebagai umat yang selalu mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat *aamiin ya Allah ya Rahman ya Rahim*.

Rasa syukur yang amat besar penulis ungkapkan atas selesainya karya ini dengan judul "**Implementasi Pp. No. 42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba**" dengan tepat waktu tanpa ada kendala yang berarti. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk mengulik tinjauan hukum Islam terhadap uang pendaftaran lomba game online yang dijadikan sebagi hadiah, apakah uang tersebut menyebabkan perlombaan sebagai bentuk perjudian atau tidak.

Keberhasilan dalam menyelesaikan isi tulisan ini tentunya bukan hanya usaha dari penulis saja, namun ada banyak pihak yang turut berperan dalam memberikan

dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan ini.

Buku yang sudah ada di hadapan anda ini bukan berarti luput dari kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat berarti bagi kami, dan akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan untuk kedepan.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Penulis



## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
----------------------------	----------

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
-----------------------------	------------

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
------------------------	-----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
1. Alasan Objektif .....	2
2. Alasan Subjektif .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Politik Hukum Islam .....	15
1. Asas-asas Politik Hukum Islam .....	23
2. Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia.....	41
3. Dinamika Politik Hukum di Indonesia .....	45
B. Waralaba .....	53

1. Pengertian <i>Franchising</i> .....	53
2. Karakter <i>Franchising</i> .....	56
C. Dasar Hukum dan Perjanjian Waralaba.....	58
1. Dasar Hukum Waralaba .....	58
2. Perizinan Waralaba.....	60
3. Waralaba Dalam Hukum Islam.....	64
D. Perizinan.....	71
1. Pengertian Perizinan.....	71
2. Fungsi dan Tujuan Izin .....	74
3. Prosedur Perizinan .....	76
E. Pemerintahan Daerah .....	81
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	81
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah .....	84
3. Kewajiban Pemerintah Daerah.....	86
F. Peraturan Daerah.....	87
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	87
2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah .....	89
3. Urgensi Peraturan Daerah.....	91
4. Muatan Materi Peraturan Daerah.....	93
G. Metode Penelitian .....	94

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambar Objek Penelitian .....	101
1. Profil dan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung .....	101
2. Visi Misi BPMP Kota Bandar Lampung .....	104



3. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung .....	105
B. Praktik Perizinan Waralaba pada BPMP Bandar Lampung .....	110

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Perizinan Waralaba di Bandar Lampung .....	115
B. Pandangan Politik Hukum Islam Mengenai Bisnis Waralaba di Bandar Lampung .....	124

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran .....	136

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 139**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Guna memperjelas pokok bahasan penulis skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **Implementasi PP. No.42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba (Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung)**. Adapun beberapa hal penting yang perlu di jelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Waralaba** adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang /jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan /digunakan oleh pihak lain berdasarkan Bisnis waralaba.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h.157.

2. **Perizinan** adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>2</sup>
3. **Hukum Islam** adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah untuk megimplementasikan PP No. 42 Tahun 2007 terhadap bisnis waralaba dan pandangannya dalam perspektif hukum Islam.<sup>3</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Secara Objektif, Pada Pasal 2 PP. No.42 Tahun 2007 diterangkan bahwasannya waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Esensi pengaturan terhadap waralaba sesungguhnya ditujukan pada perlindungan usaha kecil. Namun dalam praktiknya beragam jenis-jenis usaha waralaba tentunya terdapat kesenjangan antara pedagang kecil dan pemilik-pemilik modal besar. Terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi baik dari

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h.2

<sup>3</sup>Hukum Islam (on-line),tersedia [https:// id.wikipedia.org /wiki/ Syariat \\_Islam.co.id](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam.co.id) (diakses pada 12 Desember 2019).

segi kepemilikannya maupun dari segi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi pasar tradisional yang juga sangat terbatas dibandingkan dengan pasar moderen.

Penulis ingin mengetahui serta mengkaji prosedur perizinan waralaba di BPPM Bandar Lampung dan pandangan Islam tentang waralaba.

## 2. Alasan Subjektif

Data dan literature yang mendukung pembahasan cukup tersedia.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman pada saat ini begitu pesatnya sektor perekonomian yang semakin meningkat, dinamis dengan penuh persaingan serta tidak mengenal batas-batas wilayah. Berbagai bisnis yang dijalankan dengan mudahnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, bisnis di zaman sekarang ini diperlukannya hukum untuk menaungi dan melindungi dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan adanya kepastian hukum, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi ada pertanggung jawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut.

Indonesia seperti kebanyakan Negara berkembang yang lain, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu perkembangan pada sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup rakyat menjadi lebih mapan. Pembangunan ekonomi merupakan kekuatan pengelolaan ekonomi riil di mana dapat dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi dan kemampuan berorganisasi atau manajemen.

Berkembangnya usaha waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart di sebuah kota khususnya kota Bandar Lampung tentu di satu sisi akan membawakan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan, namun di sisi lain keberadaan waralaba berbentuk mini market seperti Indomart dan Alfamart juga dapat membawa dampak negatif bagi iklim perekonomian di suatu daerah. Timbulnya persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang pada kenyataannya pada saat ini sudah terlihat adanya persaingan yang kurang sehat antara waralaba dengan pedagang kecil, khususnya pedagang tradisional dan kios-kios kecil.

Pedagang kecil dipaksa bersaing dengan waralaba yang memiliki modal besar dan didukung dengan tempat

yang prima tentu ini akan berpengaruh kepada minat konsumen yang akan memilih berbelanja ke waralaba Indomart/Alfamart karena dirasa lebih nyaman dan harga yang lebih murah. Jika keberadaan waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah maka akan membuat para pelaku usaha kecil akan gulung tikar.

Berdasarkan Pasal 16 ayat ( 1 ) PP. Nomor 42 Tahun 2007 yang berbunyi, *"Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, 9, 10 dan/atau Pasal 11"*.

Mengingat adanya peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2 butir (i) yang berbunyi, *"Usaha Minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus) meter dari warung atau pedagang eceran yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan."*

Berkenaan dengan peraturan-peraturan di atas lokasi berdirinya minimarket Alfamart khususnya di Jl. P.Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Kelurahan Campang Jaya Beringin Bandar Lampung yang sampai saat ini masih berdiri dan belum mendapat teguran ataupun sanksi dari pihak yang

berwenang sesuai Pasal 16 ayat (1) dan Perda Nomor 17 tahun 2009 karena berdiri di dekat pasar tradisional dan para pelaku usaha kecil dengan jarak 100 meter yang jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Beberapa hal dapat mendasari beralihnya konsumen dari toko atau pasar tradisional ke minimarket, diantaranya adalah tempat yang lebih bersih serta barang-barang kebutuhan yang disediakan lebih lengkap dan berkualitas, serta konsumen dapat memilih sendiri barang kebutuhannya. Keberadaan waralaba dapat dikontrol, waralaba tidak serta merta bebas didirikan begitu saja, diperlukan izin agar waralaba dapat didirikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin juga dapat dimaksudkan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Persaingan usaha yang baik seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha harus dipegang teguh agar tidak timbul masalah-masalah yang akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Haruslah dibuat suatu peraturantentang waralaba yang kongkrit di setiap-setiap daerah agar tercipta kegiatan usaha yang sehat dan saling menguntungkan terhadap semua pelaku usaha.

---

<sup>4</sup>Rooseno Hardjowiguno, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: BPHN, 1993), hal. 5.

Mekanisme waralaba di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mengatur mengenai kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran waralaba, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pelaku usaha waralaba agar tidak terjadinya kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar.<sup>5</sup> Peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang juga menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba. Adapun dalam hal tersebut harus mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga mengatur tentang adanya larangan praktik monopoli oleh pedagang besar, dalam hal ini adalah pemilik modal besar.

Esensi pengaturan terhadap waralaba sesungguhnya ditujukan pada perlindungan usaha kecil. Namun dalam prakteknya beragam jenis-jenis usaha waralaba tentunya terdapat kesenjangan antara pedagang kecil dan pemilik-pemilik modal besar. Terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi baik dari segi

---

<sup>5</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 623.



kepemilikanya maupun dari segi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi pasar tradisional yang juga sangat terbatas dibandingkan dengan pasar modern. Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.

Pada perkembangannya bisnis usaha waralaba di kota Bandar Lampung sudah sangat menjamur, mulai dari toko swalayan, rumah makan dan jenis usaha waralaba lainnya. Pedagang tradisional di wilayah Bandar Lampung semakin terjepit, hal ini karena usaha waralaba Indomart dan Alfamart semakin menguasai pelosok kota. Bila hal ini tidak segera dihentikan akan dapat berdampak pada pedagang tradisional, sehingga jangan sampai permasalahan kedepan semakin berkembang dan berlarut-larut sudah ada dimana-mana dan berdampak pada warung kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu pengawasan terhadap jenis usaha waralaba di Kota Bandar Lampung, agar kegiatan pengelolaan di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan terarah, dan memperhatikan kepentingan usaha mikro kecil, menengah terutama pedagang kecil dan pasar tradisional.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PP. No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba di Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi PP No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba dalam perspektif politik hukum Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perizinan waralaba di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan politik hukum Islam mengenai praktik perizinan waralaba dalam perspektif politik hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Undang-undang perizinan waralaba serta tinjauan politik hukum Islamnya,

dapat memperkaya wawasan serta keilmuan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang di pelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Poltik (*Siyasah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Hukum Perizinan Waralaba, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Simatra () dengan judul Analisis Peranan Franchisor Terhadap Suksesnya Bisnis Mc Donalds Skripsi Simarta ini membahas mengenai peran pentingnya franchisor sebagai pemilik dari bisnis waralaba dalam

mengembangkan bisnis Mc. Donald's sedangkan penelitian penulis membahas mengenai proses perizinan yang benar secara hukum dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis waralaba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promotion, suport service, training, control system, communication yang dilakukan oleh franchisor memiliki peranan yang sangat penting sekali. Karena segala sesuatunya sangat membutuhkan dukungan langsung dari pihak franchisor.

2. Sulastris dengan judul Analisis pengaruh peran Franchisor terhadap keberhasilan usaha bisnis Franchise pada PT. Indomaret Skripsi Sulastris ini membahas tentang pengaruh pemilik franchise (Franchisor) terhadap kemajuan usaha bisnis Franchise pada PT. Indomaret. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai proses perizinan yang benar secara hukum dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis waralaba. Hasil uji menunjukkan bahwa pelatihan/training, dukungan/support, menyediakan/supply, fasilitas Finansial, asistensi manajemen dan mudah diakses secara persial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha bisnis franchise.
3. Sarosa dengan judul Pengaruh Faktor Dukungan dari

Franchisor, Alasan Ekonomis, Pemasaran, dan Pribadi Pada Keputusan Memilih format dan Merek Franchise. Skripsi Sarosa ini membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh atas dukungan dari Franchisor terhadap beberapa alasan seperti alasan ekonomis , pemasaran dll. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai proses perizinan yang benar secara hukum dan pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku bisnis waralaba. Faktor Pemasaran tidak berpengaruh pada keputusan memilih format dan merk franchise, sedangkan faktor dukungan dari franchisor, alasan ekonomis, danm pribadi berpengaruh terhadap keputusan memilih format dan merk franchise.

4. Rizky Pamungkas dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pemegang Usaha waralaba. Skripsi Rizky Pamungkas membahas tentang beberapa faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan usaha waralaba. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai proses perizinan yang benar secara hukum dan pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku bisnis waralaba. Menunjukan bahwa karakteristik kewirausahaan , lokasi usaha dan kinerja manajerial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha waralaba.
5. Ahmad Rizal Pelaksanaan Perizinan Minimarket di

Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Skripsi ini membahas tentang memahami prosedur dan persyaratan pemberian izin minimarket di Kabupaten Wajo serta pengawasan terhadap pelaksanaan perizinin minimarket tersebut Proses pemberian izin dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha minimarket di Kabupaten Wajo belum berjalan optimal. Karena masih terdapat minimarket di Kabupaten Wajo yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

6. Mega Setiawan dengan skripsinya yang berjudul Implementasi Pp. No. 42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba Dalam Perspektif Politik Hukum Islam (Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas memang ada beberapa kemiripan ,tetapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. Fokus dari Pembahasan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan Mega Setiawan, S.H. adalah Implementasi PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Perizinan

Wiralaba (Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung).

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Politik Hukum Islam**

Politik dalam bahasa Belanda *politek, beleid* yang artinya kebijakan (*policy*). Politik hukum artinya kebijakan hukum. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik Hukum memiliki arti yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Politik Hukum Islam adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum Islam yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang ada di dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi, hukum perlu juga dilihat dalam konteks



sosialnya, yaitu tempat dimana hukum itu berperan dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya didalam masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat hidup atau bertahan tanpa adanya hukum yang mengaturnya.

Baik masyarakat modern maupun sederhana, masyarakat urban maupun natural hukum itu akan tetap ada. Di setiap negara yang merdeka, pasti muncul kehendak untuk membentuk hukum yang dianggap cocok serta mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat, yaitu hukum yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu. Oleh karena itu, hukum ditempatkan selain untuk pengendali masyarakat (*social control*), juga sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*).

Kehendak rakyat untuk membentuk hukum itu dipresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif). Namun, seringkali lembaga legislatif tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat, tetapi lebih mencerminkan kehendak penguasa negara (eksekutif). Kehendak negara itu dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa

negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan kearah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.<sup>6</sup>

Sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Hukum telah menjadi alat kontrol sosial penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara dimana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan atau penguasa selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.<sup>7</sup>

Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di masyarakat, meskipun istilah hukum Islam dalam masyarakat itu masih sebatas pengertian "*Fiqh*". *Fiqh* bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis. *Fiqh* adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi, *fiqh* adalah sebenarnya doktrin hukum Islam atau lebih tepat dikatakan

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.30.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia, cet.1*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 300

pendapat dan ajaran para Imam Mazhab.<sup>8</sup> Di dalam perkembangannya, hukum Islam (*fiqh*) menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya didasarkan pada keyakinan dan memberikan kedamaian bagi penganutnya. Ajaran tersebut diterima sehingga masyarakat dengan rela menganut serta patuh dan tunduk mengikuti ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan.<sup>9</sup>

Pengalaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam tersebut telah menjadi norma dan pada akhirnya menjadi suatu sistem hukum yang melembaga dalam bentuk sistem peradilan<sup>10</sup>. Pada awalnya dikembangkan dan dibentuk masih sangat sederhana yang disebut dengan lembaga *tahkim*.<sup>11</sup> Keberadaan tahkim sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama Islam telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, "*Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi huk Islam*", Dalam cik hasan bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 23.

<sup>9</sup> Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.35.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>11</sup> Abdul Rahmat Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 1.

berdiri di Nusantara.<sup>12</sup> Bahkan lembaga peradilan Islam tersebut tetap berlangsung pada masa penjajahan Belanda. Meskipun pemerintah Hindia Belanda tidak bersikap netral terhadap pemberlakuan hukum Islam tersebut, yaitu dengan memberlakukan metode “pendekatan konflik” antar hukum Islam dan hukum adat.<sup>13</sup>

Politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan pendekatan konflik tersebut masih membekas untuk tidak dipertahankan di Indonesia. Dengan demikian, muncul adanya inkonsistensi penerapan hukum yang disebabkan karena adanya perbedaan kehendak masyarakat dengan ketentuan hukum yang berupa perundang-undangan (legislasi).

Situasi politik yang mewarnai pembentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU PA) yang diamandemen oleh UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU PA) turut mewarnai kecenderungan dan arah kebijakan hukum negara yang bisa

---

<sup>12</sup> Abdul Ghufur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah kedudukan dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 45.

<sup>13</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoort Voor Inlandsche Zaken*. (Jakarta: LP3IS, 1986), h.12.

dilihat dari aspek politik pembentukan hukum, aspek politik mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum), dan aspek politik penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut telah membuat hukum Islam yang dipraktikkan masyarakat Muslim Indonesia mengalami konflik dengan aturan-aturan legal formal lainnya. Bahkan, antar Pasal dalam satu aturan legal formal itu sendiri terjadi konflik, terutama dalam tataran penerapannya.<sup>14</sup> Padahal konflik aturan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial budaya di masyarakat.<sup>15</sup>

Demikian juga dikaitkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama mengalami konflik dengan hukum adat atau hukum Islam yang dipraktikkan dalam masyarakat Muslim Indonesia, karena hukum adat dan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat juga termasuk dalam pengertian hukum material dan hukum substantif. Hal

---

<sup>14</sup> Misalnya aturan tentang pencatatanya dan sahnya perkawinan dalam UU No.1/1974, Lihat kasus Kasus pencatatan perkawinan dalam Stijn Cornelis Van Huis and Theresia Dyah Wirastri, "Muslim Marriage Registration in Indonesia: Revised Marriage Registraton Laws Cannot Overcome Compliance Flaws", *Australian Journal Of Asian Law*. Vol. 13, No. 1 (2012), h.1-17.

<sup>15</sup> Stijen Cornelis Van Huis and Theresia Dyah Wirastri, *Muslim Marriage Registration in Indonesia*. h. 3-4.

ini bisa dilihat dari keberadaan KHI sebagai rujukan (hukum materi) bagi penyelesaian perkara di pengadilan agama.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, maka bisa dikatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di Indonesiamasih terikat dengan politik hukum penguasa yang tidak benar-benar secara utuh mendukung pemberlakuan hukum Islam yang sesuai dengan adat masyarakat muslim Indonesia. Adanya politik hukum tersebut menyebabkan terciptanya inkonsistensi pengaturan dan penerapan asas hukum.

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara. Hukum nasional tersebut bisa berupa hukum material dan hukum acara. Hukum material merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara hukum dipengadilan selain hukum acara. Hukum positif material, yang juga disebut dengan istilah hukum substantif, yaitu ketentuan hukum yang mengacu kepada aturan perundang-undangan. Sedangkan, aturan perundang-undangan ini

---

<sup>16</sup> Mengenai perdebatan seputar status hukum KHI dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia bisa dilihat misalnya, dalam Euis Nurlaela Wati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam:Amsterdam Univesity Perss, 2010), h. 95-129.

bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bisa berupa hukum adat atau hukum Islam. Sedangkan, hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang terkait.<sup>17</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, politik hukum Islam adalah arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama, atau kebijakan dasar penyelenggaraan Negara bidang hukum Islam yang akan atau sedang berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan.<sup>18</sup>

Adanya inkonsistensi antara satu ketentuan Pasal dengan Pasal lain dalam hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama, juga adanya perbedaan antara hukum dalam perundang-undangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dipaparkan diatas.

---

<sup>17</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 40.

<sup>18</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 237

## 1. Asas-asas Politik Hukum Islam

- a. Meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (*Adamul Haraj*)

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini karena Islam menghadirkan pembicaraanya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang makruf dan mencegah pada yang munkar.<sup>19</sup>

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 24.



dilaksanakan oleh umat manusia. Dalam hukum Islam dikenal istilah rukhshah (peringanan hukum). Contoh dari rukhshah adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam dikenal istilah dharurah (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Misalnya, dharurah adalah kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa beban kewajiban manusia tidak pernah bersifat memberatkan antara lain :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ  
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
 وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau

*bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'af lah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah[2]:286)<sup>20</sup>*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.49.

*yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S Al-Baqarah[2]:185)<sup>21</sup>*

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.28.

*Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong". (Q.S Al-Hajj [22]: 78)<sup>22</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ  
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.341.

وَأَيِّدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ  
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (Q.S. Al-Maidah [5]:6)<sup>23</sup>

#### b. Menyedikitkan Beban (*Taqlil Al-takalf*)

Nabi melarang para sahabat memperbanyak

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.108.

pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi Muhamad SAW., justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum untuk memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi umat manusia. Dugaan atau prasangka tidak boleh dijadikan dasar penetapan suatu hukum, yang di mana sudah dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ

تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".* (QS. Al-Maidah [5]:101).<sup>24</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistik. Nabi ditanya apakah

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.124.

kewajiban haji itu setiap tahun, Nabi SAW menjawab: "Kalau pertanyaan itu saya jawab "ya", maka akan menjadi kewajiban bagiku: (karena itu), biarkan saja selama aku meninggalkanmu; Sungguh telah rusak beberapa kaum yang sebelum kamu ini (terlalu) membanyakkan pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-Nabi mereka. Ayat lain menjelaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah". (An-Nisa [4]:28).*<sup>25</sup>

Kandungan dari ayat di atas bahwa dalam syariat yang di bawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat sebagaimana yang dipikulkan kepada Bani Israil. Misalnya, mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak, tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis.

c. Ditetapkan Secara Bertahap (*Tadrijiyyan*)

---

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h.83.

Setiap adat tentu memiliki adat kebiasaan atau tradisi atau adat, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada pula yang sifatnya dangkal. Ketika Islam datang, bangsa Arab mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap mata. Apabila di hilangkan sekaligus menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.<sup>26</sup>

Menurut pandangan sosiologi Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa "suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada".<sup>29</sup> Masyarakat senantiasa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. Faktor tradisi dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan ke keadaan lain yang asing sekali bagi mereka.

Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa,

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 29.



kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, hukum yang diturunkan lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah untuk mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.<sup>27</sup> Karena perjudian dan minuman keras telah berurat akar dalam tradisi Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syairnya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur, mula-mula diturunkan firman Allah yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Q.S. Al-

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h.29.

Baqarah[2]: 219)<sup>28</sup>

Ayat ini belum memberikan suatu larangan yang tegas bagi peminum khamar, tetapi baru memberitakan bahwa kerugiannya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian setelah jiwa mereka dapat mempertimbangkan untung ruginya minuman khamar, maka turun lagi firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 29-30.

*sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."* (Q.S. An-Nisa[4]:43) <sup>29</sup>

Baru setelah turun kedua ayat tersebut, Allah menurunkan ayat yang dengan tegas mengharamkan minuman keras. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al-Maidah[5]: 90)<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.34.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.85.

Seperti halnya hukum riba. Dalam Al-Quran menjelaskannya secara bertahap. Riba/bungaberlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab sebelum dan sesudah masuknya Islam melakukan muamalah dengan campur tangan riba di dalamnya. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya adalah haram.<sup>31</sup> Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah.

Menurut para mufassir mengatakan bahwa proses keharaman riba di dalam Al-Qur'an disyariatkan Allah secara bertahap yaitu:

Tahap pertama, Allah menunjukan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam firmanNya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.123.

*itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-Rum [30]:39)<sup>32</sup>*

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, menurut para mufassir, ayat ini termasuk ayat Makiyyah (ayat-ayat yang diturunkan pada periode mekah). Akan tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Tahap kedua, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi. Hal ini di sampaikan dalam firman Allah:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan*

---

<sup>32</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhktar* „ala add-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilid IV), h. 165.

*untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (Q.S. An-Nisa [4]: 161)<sup>33</sup>*

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini di sampaikan oleh Allah dalam firman-Nya:

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى  
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً  
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: "Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur)[185]. segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi

---

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ,(Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h.401.

*orang-orang yang mempunyai mata hati". (Q.S. Ali Imran [3]: 13)<sup>34</sup>*

d. Memperlihatkan Kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu hukum Islam sangat menegakkan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa di dasarkan pada tiga sendi pokok yaitu :

- 1) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu;
- 2) Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukan masyarakat dibawah ketetapananya;
- 3) Hukum-hukum ditetapkan menurut khadar kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

Selain itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh

---

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ,(Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h.103.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 51.

kebutuhan- kebutuhan praktis dan untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang di larang. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu di pandang Islam bermalahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*thayib*) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

Secara luas maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam makhasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan (*dien*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), harta benda (*maal*) dan rasionalitas (*aql*). Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid secara terintegrasi

#### e. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaanya ketika berbuat kezhaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang



bersangkutan berhadapan dengan pengadilan Allah. Pada khutbah Haji Wada" yang pengikutnya hampir seluruh orang berkebangsaan Arab, Rasulullah bersabda :“Tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang ajam”. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu  
Jadi orang- orang yang selalu menegakkan  
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.  
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap  
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak  
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat  
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,  
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang  
kamu kerjakan".(QS. Al-Maidah [5]: 8)<sup>36</sup>*

Kaidah-kaidah umum yang harus di perhatikan dalam

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*,(Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007), h.105.

menerapkan hukum adalah :<sup>37</sup>

- 1) Mewujudkan keadilan.
- 2) Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
- 3) Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat.
- 4) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.
- 5) Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri.

Di samping orientasi keadilan, hukum Islam juga berorientasi pada moralitas. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan

## 2. Pemikiran Politik Hukum Islam di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat semakin kokoh jika dilihat dari keberadaan Undang-Undang yang memberi kewenangan bagi pengadilan agama untuk

---

<sup>37</sup> Hasbi Asidieqy, *Fakta eagungan Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 25- 26.

menangani perkara-perkara hukum Islam tertentu bagi umat Islam di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, Inpre No.1 /1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai hukum terapan atau hukum material bagi Pengadilan Agama (PA) sampai masa reformasi yang memberi perluasan kewenangan bagi PA untuk menangani perkara ekonomi Islam melalui perubahan undang-undang No.7/1989 yaitu UU No.3/2006 dan perubahan yang keduanya yaitu UU No.50/2009.

Oleh karena itu, terlihat sebagai suatu kemajuan dan kekokohan eksistensi Pengadilan Agama, tetapi belum tentu ideal sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, hal ini sangat terkait dengan *political will* dari pemerintah dalam menempatkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia. Paradigma positif dalam politik hukum nasional nampak sekali dari aspek-aspek yang dapat menimbulkan konflik hukum sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu aturan hukum yang hanya merupakan aturan dasar legalitas dalam menegakkan hukum prosedural tetapi mengabaikan keadilan substantif sehingga aturan tentang prosedur menjadi lebih penting daripada hukum untuk mencapai keadilan (*justice*), yang merupakan tujuan para pihak yang berperkara.

Menurut Soctandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa "Kebijakan unifikasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak lebih dari sebuah tawaran yang sulit dalam konteks Indonesia karena bertentangan dengan realitas sosial sepanjang abad".<sup>38</sup> Kondisi ini tercermin dalam keadaan yang terjadi di Pengadilan Agama, yaitu pembentukan sistem hukum acara peradilan Agama dengan dibentuknya hukum positif melalui UU Perkawinan, UU PA dan lain-lain dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Padahal, ketentuan-ketentuan di dalam aturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk umat Islam tersebut ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan hukum yang berakibat pada kesukaran pada para pihak yang mencari keadilan dan kebenaran (*serching for the truth and justice*) yang merasa tidak tercapai atau terhalang oleh tembok-tembok prosedural hukum. Kondisi inilah keadilan prosedural yang lebih banyak dicapai bukan keadilan substansi.<sup>39</sup> Dengan kondisi seperti itu, Umat Islam di Indonesia hanya bisa menerima hukum yang sudah ditetapkan oleh negara

---

<sup>38</sup> Soctandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1994), h. 60.

<sup>39</sup> Ibnu Elmi A.S Pelu, "*Titik Taut*", h. 351.

sebagai Undang-Undang.

Menurut ulama ushul *al-fiqh*, sebagaimana dikemukakan oleh Satria Effendi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menentukan sikap hukum untuk mencapai keadilan yaitu : (1) Bilamana salah satu pendapat telah menjadi undang-undang dalam sebuah negara, (2) Jika belum menjadi undang-undang tetapi telah menjadi suatu kesepakatan didalam masyarakat bahwa pendapat itulah yang menjadi pegangan, (3) Jika belum ada undang-undang dan belum juga ada kesepakatan maka pendapat yang diambil adalah pendapat yang bisa dipakai dan dikenal dinegeri itu, (4) Hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut, di samping jika suatu pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga pada kasus tertentu dalam pandangan hakim bilamana pandangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap yang bersangkutan; dalam kasus seperti ini hakim boleh membuat keputusan pengecualian yang dikenal dengan *istihsan*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Penanda Media, 2004), h. 351.

### 3. Dinamika Politik Hukum di Indonesia

Penduduk Indonesia mayoritas Muslim sehingga hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat, meskipun istilah „hukum Islam” dalam masyarakat itu masi sebatas pengertian *“fiqh”*. *Fiqh* bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. *Fiqh* adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi *fiqh* sebenarnya adalah doktrin hukum Islam, atau lebih tepat dikatakan pendapat dan ajaran para Imam Mazhab.<sup>41</sup>

Sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara, tata hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia. Akan tetapi, apa yang disebut sebagai hukum Islam dalam masyarakat itu masih bercorak pembahasan *fiqh*, yaitu masi bersifat doktrin hukum yang berorientasi pada ajaran Imam Mazhab. Untuk mempositifkan tata Hukum Islam diperlukan legislasi dari negara, maka kemudian dari sini politik hukum penguasalah yang berperan. Akan di arahkan kemana sistem politik hukum Islam yang di dalam masyarakat masi berupa *fiqh*

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *“Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 23.

(doktrin hukum) itu hendak dikembangkan.

Upaya mempositifkan sistem tata hukum Islam sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya dan hak hidupnya di Indonesia, sudah pernah dilakukan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Meskipun pada masa itu belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis dan unifikatif. Hukum yang diterapkan masih berupa abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin *fiqh*.<sup>42</sup>

Tata hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia secara konstitusional, dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda itu, upaya mempositifkan hukum Islam itu diwarnai dengan tarik menarik antara hukum Islam dan hukum adat sehingga terjadi dinamika sesuai kehendak penguasa. Dari tarik menarik itu dalam sejarah hukum Indonesia menghasilkan dua teori yaitu teori *Receptio In Complexu* yang memberlakukan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia asli (Pribumi), dan teori *receptie* yang berusaha menyingkirkan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum adat bagi warga pribumi.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.24.

Berbicara hukum Islam di Indonesia tentu akan berkait dengan hukum adat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum Islam di Indonesia yang telah membuktikan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat selalu terjadi interaksi atau satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia mulai dari teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, dan terakhir teori *receptio a contrario* mencerminkan adanya interaksi atau pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat, baik itu karena pengaruh kondisi sosial, budaya maupun politik.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya telah terjadi dinamika dalam pemberlakuan hukum di Indonesia yang sangat terkait dengan situasi sosial dan politik serta tidak bisa terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi. Sejarah hukum di Indonesia telah menyebutkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum pada waktu itu telah terbagi pada waktu dua periode, pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (*receptio in complexu*), dan kedua priode penerimaan hukum Islam



dalam hukum adat (*receptie*).<sup>43</sup>

Pada masa kemerdekaan, meskipun sejak tahun 1945 Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, namun tidak secara otomatis membawa arus perubahan yang langsung dan menyeluruh dalam bidang hukum. Pada saat dibacakan naskahproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, hukum di Indonesia secara esensial tidak terlalu berbeda dengan hukum yang ada pada masa penjajahan Belanda maupun penduduk Jepang.<sup>44</sup> Hal ini terlihat dari aturan peralihan Pasal 2 dari UUD 1945 yang menentukan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum, pemerintahan yang baru masih menggunakan beberapa macam aturan hukum yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda, termasuk beberapa

---

<sup>43</sup> Ismail Suny, "*Kedudukan Hukum Islam dalam dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*", dalam Amrullah Ahmad (Ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), h.131, lihat juga Juhaya.S. Praja "*Pengantar*", dalam Eddi Rudiana Arief (Ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perlembangan dan Pembentukan*, cet.2, (Bandung Remaja Rosdakarya, 1994), h. 10.

<sup>44</sup> Subekti, *Law in Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi dan CSIS, 1982), h. 6.

peraturan yang masih berakaitan dengan hukum Islam.

Meruntuhkan kekuatan dan kekuasaan kolonial serta membangun kedaulatan nasional, para pemimpin pada awal kemerdekaan cenderung untuk memandang hukum secara esensial sebagai suatu organ rasional legal dari suatu Negara. Berbagai bentuk reformasi ditunjukkan untuk meruntuhkan dominasi hukum kolonial semaksimal mungkin. Suatu kebijakan hukum yang baru haruslah dibangun untuk menggantikan kebijakan hukum kolonial.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan kebijakan hukum Islam, Hazairin (1906-1975) menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan UUD 1945 dijadikan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Oleh karena itu, teori *receptie* harus keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Pernyataanya itu kemudian dikenal sebagai teori *receptie exit*. Teori *receptie exit* yang dikenalkan oleh Hazari ini kemudian dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan teorinya yang dikenal dengan *receptio*

---

<sup>45</sup> Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 52-53.

*a contrario*. Teori ini mengatakan bahwa yang berlaku bagi umat Islam yang ada di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat itu berlaku untuk umat Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam.<sup>46</sup>

Pada masa orde lama, usaha untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif dilakukan mulai dari usaha menjadikan Islam sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan melalui sidang-sidang BPUPKI. Dari sini terlihat adanya usaha-usaha umat Islam untuk melakukan peralihan hukum Islam berdimensi Syariah menjadi dimensi Qanun. Pada saat itu, umat Islam terpecah menjadi dua kubu yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Nasionalis Islam merupakan kelompok yang didominasi oleh orang-orang Islam kalangan santri, baik tradisional maupun modernis. Kelompok ini memperjuangkan Islam agar dijadikan sebagai dasar negara. Sedangkan, Nasionalis Sekuler adalah kelompok yang menghendaki agar Indonesia tidak didasarkan pada agama, tetapi pada Nasionalisme. Kelompok ini didominasi oleh orang-orang Islam kalangan abangan dan non-Muslim.

---

<sup>46</sup> Sajuti Thalib, *"Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Receptio and Mamoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin"*, (Jakarta: UI-Press), h. 52-54.

Setelah gagal dengan tujuan mereka, kelompok Nasionalis Islam sekali lagi berusaha memperjuangkan hukum Islam sebagai hukum positif yang diberlakukan bagi umat Islam dengan berusaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta pada sidang-sidang Konstituante. Walaupun usaha yang terakhir pun juga gagal namun patut dicatat bahwa pada masa orde lama banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, meskipun masih banyak yang belum terakomodasi, diantaranya tentang kedudukan peradilan agama yang masih berada di bawah standar untuk dikatakan sebagai lembaga pengadilan yang independen.

Pada masa Orde Baru, aspirasi umat Islam untuk melegislasikan hukum Islam selalu mendapat tantangan dari kelompok Nasionalis Sekuler, sampai akhirnya ada perubahan konfigurasi politik yang menyebabkan aspirasi umat Islam banyak diakomodasi oleh Negara, yaitu pada dekade 1980-an. Hal yang paling penting dari keadaan ini adalah yaitu ditetapkan UU Nomor 7/1989 yang menjadikan lembaga Pengadilan Agama memiliki status mandiri dan sejajar dengan lembaga- lembaga pengadilan negar lainnya. Selain itu juga ditetapkan KHI dalam impres. Nomor 1/1991 sebagai bahan rujukan umat (Hukum Islam

Materiil) bagi para hakim PA tersebut.

Aspirasi umat Islam untuk melegislasikan hukum Islam telah diakomodasi oleh negara, ternyata hal itu belum sepenuhnya merupakan *political will* pemerintah sehingga keberadaanya masih di persimpangan jalan. Legislasi hukum Islam menjadi hukum positif terbukti telah menyebabkan adanya reduksi sampai pada tingkat yang dikehendaki oleh negara dan membuat penganut agama lain merasa tidak terancam. Mungkin dengan alasan inilah pemerintah menetapkan KHI hanya dengan Instruksi Presiden (Inpres), bukan berbentuk undang-undang. Selain itu, hukum Islam yang telah tereduksi oleh negara tersebut dalam proses implementasinya hanya bersifat Fakultatif, tidak imperatif.

Sejarah hukum, seperti secara sepintas telah disebut diatas, sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Artinya, bahwa hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karena kebijaksanaan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan perwujudan dari kebijaksanaan politik negara. Hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Dengan demikian, menggelar dirkusus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara dimana hukum itu diciptakan. Dalam karakter ini, suatu produk hukum dipengaruhi atau ditentukan oleh

konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya, suatu konfigurasi tertentu dari kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.<sup>47</sup>

Selain karena pengaruh politik penguasa, hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, secara langsung atau tidak berpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya yang memberi dampak pada perubahan sistem hukum. Akan tetapi sebaliknya, hukum dapat pula mengubah struktur dan lembaga-lembaga sosial.<sup>51</sup> Dalam hal ini diperlukan peran negara dengan politik hukumnya, seperti telah disebutkan di atas.

## **B. Waralaba (Franchising)**

### **1. Pengertian Franchising**

Kata *Franchising* sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, cet. 1.* (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 300.

dari perhambaan (*free from servitude*). Dalam bidang bisnis Franchising berarti kebebasan yang di peroleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu.

Franchising ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Lebih spesifik lagi, franchising adalah suatu konsep pemasaran. Sedangkan pakar lain melihat franchising tidak hanya sekedar suatu metode atau konsep tetapi lebih merupakan suatu sistem. Suatu metode atau konsep yang dapat dioperasionalkan dalam kerangka atau tatanan yang membuat hubungan lebih teratur dan terarah, antar subsistem dengan subsistem yang lain. Oleh itu, franchising diartikan sebagai suatu sistem pemasaran atau sistem usaha untuk memasarkan produk atau jasa tertentu.

Franchising adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara pemasaran barang atau pun jasa dengan memberikan unsur kontrol tertentu kepada pemasok (*franchisor*) sebagai imbalan yang digandeng oleh pihak yang mendapat hak (*franchise*) untuk menggunakan nama dan merek franchisor.

Perusahaan yang memberikan lisensi disebut *franchisor* dan penyalurnya disebut *franchisee*. Perusahaan kecil men

definisikan franchising sebagai suatu sistem dan distribusi dimana suatu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang diselenggarakan seolah-olah merupakan bagian dan merupakan suatu rangkaian yang besar, lengkap dengan nama produk, dan merek dagang, dan prosedur penyelenggaraan standar. Ada 4 (empat) hal yang menonjol dalam hal pemasaran konsep franchising yaitu *produk*, *price*, *place/distribution* dan *promotion* (4P). Keempat hal yang spesifik ini terutama tampak pada aspek distribusinya yang dalam operasionalnya melibatkan kerja sama dengan pihak lain yang independen. Franchising dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang bersekala kecil dan menengah, hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, disuatu tempat tertentu.

*British Franchise Association* (BFA) mendefinisikan franchise sebagai berikut : franchise adalah kontraktual licence yang diberikan oleh suatu pihak (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*) yang :

- a. Mengizinkan *franchisee* untuk menjalankan usaha selama periode franchise berlangsung, suatu usaha



tertentu yang menjadi milik *franchisor*.

- b. Franchisor berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode franchise.
- c. Mengharuskan *franchisor* untuk memberikan bantuan pada franchisee dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek franchisenya (berhubungan dengan pemberian pelatihan, *merchandising* atau lainnya).
- d. Mewajibkan *franchisee* untuk secara periodik selama periodik *franchising* berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai jumlah pembayaran atas franchise atau produk atau jasa yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*.
- e. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (*holding company*) dengan cabangnya atau antara cabang dan perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

## 2. Karakter *Franchising*

Ada beberapa karakteristik Dasar *franchising* :<sup>48</sup>

- a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee. Isi kontrak pada dasarnya dapat di

---

<sup>48</sup> Rechard Burton Simatumpang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), .h.56

negosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

- b. *Franchisor* harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Juga memelihara kelangsungan usaha franchise dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis (misalnya Periklanan, Supervisi dan sebagainya).
- c. *Franchise* diperbolehkan (dalam kendali franchisor) beroperasi dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan atau prosedur, serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki franchisor.
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dan sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain (misalkan kredit perbankan). Pada outlet (tempat penjualan) yang dikelola franchisee, tidak ada investasi langsung dari franchisor. Yang lazim adalah pengadaan peralatan dengan fasilitas leasing atau barang dagangan secara cicilan oleh franchisor, atau pengadaan gedung oleh franchisor yang disewakan kepada franchisor ke dalam unit usaha yang dikelola franchisee.
- e. *Franchisee* berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.
- f. *Franchisee* membayar fee atau royalti kepada franchisor

atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus diberikan oleh franchisor. Royalti umumnya hanya dikenakan oleh franchisor tertentu yang sudah memiliki merek dagang yang terkenal. Sedangkan fee merupakan bentuk beban (*charge*) yang umum dikenakan oleh franchisor.

- g. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana dia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.
- h. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

## **C. Dasar Hukum dan Perjanjian Waralaba**

### **1. Dasar Hukum Waralaba**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, secara umum mengenai perjanjian waralaba (*franchise*) di Indonesia telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anatar lain, (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kegiatan bisnis waralaba harus memiliki dasar hukum yang kuat, yang dimana dasar hukum tersebut merupakan bagian dari

perjanjian atau kontrak. Perjanjian sebagai dasar hukum pada bisnis waralaba, telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 (KUHPerdata). Ketentuan tersebut memberikan maksud, bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian, bebas untuk melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Menurut undang-undang di Indonesia waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka atau penjualan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 42 Tahun 2007 waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan bisnis waralaba.

## 2. Perizinan Waralaba

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa setiap semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh.

Perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan.<sup>49</sup> Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa "suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya".

---

<sup>49</sup> Rechard Burton Simatumpang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 156.

Untuk melaksanakan ketentuan diatas, khususnya ketentuan mengenai izin telah dikeluarkan keputusan Menteri Perdagangan Nomor :1458/KP/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam keputusan menteri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP. Untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau kantor perdagangan setempat.

Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- 1) Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 25.000.000;
- 2) Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000;
- 3) Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 100.000.000.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Fachrudin, *Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan*, (Bandar Lampung: 2016), h. 14.

SIUP perusahaan kecil dan menengah mempunyai masa berlakuyang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan, SIUP perusahan besar memiliki masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok, ada perusahaan-perusahaan yang di bebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP, yang terdiri dari :

- 1) Cabang/perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.
- 2) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.
- 3) Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka undang- undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam Negeri.
- 4) Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum); dan
- 5) Perusahaan kecil perorangan.

Yang dimaksud perusahaan kecil perorangan adalah

---

perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan;
- b) Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat;
- c) Keuntungan perusahaan benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya; dan
- d) Setiap usaha dagang berkeliling, pedagan pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 (tiga) kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang/perwakilan perusahaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan perusahaan.
- b) Wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang, dan
- c) Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi



perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Waralaba Dalam Hukum Islam

### a. Serikat Inan (Perseroan)

Serikat Inan adalah Akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu.

Berarti Allah SWT. akan menolong kemajuan perserikatan selama orang yang berserikat itu tetap ikhlas. Tetapi, apabila timbul penghianatan diantara mereka, maka Allah akan mencabut kemajuan perserikatan mereka. Rukun Serikat:

#### 1) Ada Sighatnya (Lafaz Akad)

Kata akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, "waralaba berserikat pada barang ini, dan di izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainya." Jawab yang lainnya "diterima seperti yang engkau katakan itu."<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo), h.298.

- 2) Ada orang yang berserikatnya Syarat menjadi anggota berserikat:
  - a) Berakal
  - b) Baligh (berumur 15 tahun)
  - c) Merdeka dan dengan kehendaknya sendiri.
- 3) Ada pokok/modal pekerjaanya Syarat Modal Berserikat:
  - a) Modal hendaklah berupa uang (emas atau perak) atau barang yang di tambang atau ditakar, msalnya beras, gula, dan lain- lainnya.
  - b) Dua barang modal itu hendaklah dicampurkan sebelum akad sehngga antara kedua bagan barang itu tidak dapat dibedakan lagi. Modal dan kerja tidak perlu sama. Seseorang boleh meberi modal Rp. 100.000,00 dan yang lainnya Rp. 50.000,00 begitu juga kerjanya, tidak berhalangan bila salah seorang bekerja satu hari, sedangkan yang lain setengah hari, asal berdasarkan hasil mufakat antara keduanya pada waktu akad.

#### b. Serikat Kerja

Serikat kerja adalah dua orang tenaga ahli atau lebih, bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah)-nya adalah untukmereka bersama menurut perjanjian antara

mereka, baik keahlian antara keduanya sama ataupun berbeda, seperti tukang kayu dengan tukang kayu, atau tukang besi dengan tukang besi.

Begitu juga penghasilanya, besarnya menurut perbandingan antara keduanya, hanya perbandinganya itu hendaklah ditentukan sewaktu akad. Termasuk juga dalam serikat kerja adalah berserikat mencari ikan atau memburu binatang daratan, mengambil barang-barang yang halal dari laut ataupun bumi, seperti perkongsian untuk mengambil kayu dari hutan yang tidak dimiliki oleh manusia, dan mengambil batu dari sungai yang tidak dimiliki orang.<sup>52</sup>

#### c. Hukum Serikat

Serikat yang pertama (Serikat Inan), para ulama telah bersepakat tentang sahnya; hanya ada sedikit perbedaan syarat-syarat dan cara-caranya. Adapun yang kedua (serikat kerja) menurut Mazhab Syafi'i tidak sah dan tidak boleh, tetapi mazhab yang lain berpendapat boleh dan sah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bagaimana perlunya masyarakat dan perseorangan pada perkongsian kerja ini, tentu kita akan sepaham dengan pendapat yang kedua ini.

#### d. Faedah Serikat

---

<sup>52</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h.298.

Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa, bahkan dapat pula menjadi jalan untuk meneguhkan tali perhubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu umat dengan umat yang lain. Dengan perkongsian, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat bahkan perhubungan antar negara akan lebih mudah dan lancar, dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat di kerjakan oleh perseorangan dan tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga dan modal bersama (gotong royong).

e. Perikatan Dalam Hukum Islam

- 1) Konsep perikatan dan sumber perikatan dalam hukum barat.

Salah satu pembedaan hukum objektif paling tua dan berasal dari hukum Romawi adalah pembedaan antara hukum publik dan hukum privat. Yang terakhir ini meliputi hukum privat internasional, hukum acara perdata dan hukum privat materil. Menurut ilmu hukum Belanda, hukum privat materil (*materieel privatrecht*) dan hukum dagang (*handlesrecht*). Hukum perdata pada gilirannya dibedakan lagi menjadi hukum orang dan keluarga (*personen-en familierecht*), hukum badan hukum (*rechtspersonenrecht*) dan hukum harta kekayaan

(*vermogensrecht*). Kemudian, hukum harta kekayaan dibedakan lagi menjadi dua yaitu, hukum benda (*goederenrecht*) dan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Kemudian, hukum harta kekayaan dibedakan lagi menjadi dua yaitu hukum benda (*goederenrecht*) dan hukum perikatan (*verbintenssenrecht*). Dilihat dari segi sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta dari sumber-sumber lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan yang lahir dari berbagai macam-macam sumbernya itu dinamakan hukum perikatan (*het verbintenisrecht*). Sedangkan, hukum perjanjian (*het overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja. Di Indonesia, perikatan-perikatan (dalam lapangan hukum harta kekayaan) di atur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sepanjang menyangkut terminologi, di Indonesia umumnya digunakan istilah "perikatan" sebagai padanan istilah Belanda *verbintenis* dan "perjanjian" sebagai padanan istilah Belanda *overeenkomst*. Namun, ada yang menggunakan kata "persetujuan" sebagai terjemahan *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan istilah "perutangan" untuk memberi padanan kata *verbintenis*, sedangkan untuk istilah *overeenkomst* digunakan "persetujuan". Akan tetapi, kebanyakan menggunakan istilah "perikatan" sebagai padanan kata Belanda *verbintenis*.

## 2) Konsep Perikatan

Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing- masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari kegiatan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Misalnya, sebuah bengkel dan seorang pemilik mobil berjanji bahwa yang pertama (pihak bengkel) sanggup memperbaiki mobil rusak milik yang terakhir dan yang terakhir (pemilik mobil) sanggup menyerahkan uang sebagai imbalan atas jasa perbaikan tersebut.

Antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus menciptakan sebuah ikatan yang mengikat satu sama lain. Ikatan itu berwujud bahwa salah satu pihak (pemilik mobil) berhak untuk menerima jasa perbaikan mobil yang wajib dilakukan oleh pihak lain (bengkel), sementara pihak lain (bengkel) berhak atas sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh pihak pemilik mobil sebagai imbalan atas jasa perbaikan mobil yang dilakukannya.

Contoh diatas tampak bahwa perikatan merupakan suatu hubungan, karena menyangkut ikatan antara dua

pihak atau lebih, yaitu pihak yang berhak yang disebut kreditor dan pihak yang berkewajiban yang disebut debitur. Hubungan itu diatur dan disahkan oleh hukum, sehingga karena itu perikatan dikatakan sebagai suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini menyangkut harta kekayaan, yaitu segala kepentingan yang bernilaiuang dan di lindungi oleh hukum.

### 3) Sumber-sumber Perikatan

Sumber-sumber perikatan dalam hukum indonesia ada dua, yaitu (1) perjanjian, dan (2) undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang- undang." Perjanjian adalah sumber perikatan yang paling penting.

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitanya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung di perintahkan oleh undang-undang, seperti hak dan kewajiban yang timbul antara anak dan ayah dalam hal nafkah, juga beberapa hak dan kewajiban antar pekarangan yang bersebelahan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 625 KUH Perdata), hubungan yang muncul

dari kewajiban pemeliharaan (Pasal 321 KUH Perdata), dan hubungan pupil dan wali (Pasal 385, 409 KUH Perdata).

## **D. Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Pengertian izin yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan secara istilah, mengizinkan memiliki arti memperkenankan, memperbolehkan dan tidak melarang.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.<sup>53</sup>

W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.

---

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Unevercity), h. 143



E Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).

Sedangkan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, pengertian izin dibagi dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas adalah izin merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari

pengertian izin.<sup>54</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, pengertian perizinan adalah sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa

---

<sup>54</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, (Surabaya: Yuridika), h. 2-3.

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

konkret, dan prosedur dan persyaratan.<sup>56</sup>

Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya.

## 2. Fungsi dan Tujuan Izin

Pemerintah memiliki tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umu. Tugas mengatur yang meliputi pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat umum meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana financial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

---

<sup>56</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), h.201-202.

Sistem perizinan dibuat karena tugas pemerintah yang mengatur, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit. Tujuan pemerintah membuat peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen).
- d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).<sup>57</sup>

Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan

---

<sup>57</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, (Surabaya: Yuridika), h. 45.

dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:<sup>58</sup>

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan hukum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

### 3. Prosedur Perizinan

#### a. Prosedur dan Proses Perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda- beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tatacara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai :

---

<sup>58</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa), h. 94-95

sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar dan wajib dikomunikasikan secara luas.

#### b. Persyaratan

Persyaratan adalah hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.<sup>59</sup>

- 1) Konstitutif adalah suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional adalah penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

#### c. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengelolaan perizinan. Adapun syarat-

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 200.

syarat biaya perizinan:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas

d. Pengawasan dan Sanksi dalam Penegakan Hukum  
Perizinan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif.

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan

rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan.<sup>60</sup>

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa pengawasan diadakan untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan- kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

---

<sup>60</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 9.



#### e. Sanksi

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.<sup>61</sup> Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan dari sanksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan perbuatan secara norma.
- 2) Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma.
- 3) Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma.
- 4) Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.

---

<sup>61</sup> Tegoeh Soejono, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama), h.233.

## **E. Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.<sup>62</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

---

<sup>62</sup> Pemerintahan Daerah (*on-line*) tersedia di : <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html> (diakses pada 22 September 2020).

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua

penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah.

## 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Setiap tingkatan daerah memiliki kepala daerahnya masing-masing. Dalam menjalan roda pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Jika dalam tingkatan provinsi maka seorang gubernur akan dibantu oleh wakil gubernur dan sedangkan di tingkat II seperti kabupaten/kota dipimpin oleh bupati yang dibantu oleh wakil bupati.

Dalam melaksanakan fungsinya, kepala daerah

memiliki batasan tugas dan kewenangan yang diatur berdasar pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas kepala daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1)

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) diatur tentang kewenangan Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67.

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

## **F. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah terdiri dari dua kata yaitu "peraturan" dan "daerah". Menurut S.F Masbun pengertian Peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *General norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat



umum (general).<sup>65</sup> Sedangkan, menurut Lydia Harlina Martono, Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Pengertian Daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:<sup>66</sup>

*“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>67</sup>

Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada

---

<sup>65</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta),

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 1 angka 8.

tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan pemaparan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya. Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.

## 2. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idea der Waarheid*), dan

---

<sup>68</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta), h. 37.

cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*).<sup>69</sup>

Pembuatan peraturan perundang- undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan perda.<sup>70</sup> Contohnya di Negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Landasan yuridis terbagi dalam tiga segi, yang terdiri dari:<sup>71</sup>

- a. Landasan yuridis segi folmal, landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

---

<sup>69</sup> Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*, (Jakarta: Grafindo Persada), h. 113.

<sup>70</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta), h. 54.

<sup>71</sup> Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 25.

- b. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang member kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>72</sup>

### 3. Urgensi Peraturan Daerah

Keberadaan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>73</sup> Didik Sukriono, *Hukum konstitusi dan konsep otonomi*, (Malang: Setara Pres), h. 138.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan otonom daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>74</sup>

#### 4. Muatan Materi Peraturan Daerah

Menurut A. Hamid S. Attamimi, materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang menentukannya.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam undang-undang yang sama Pasal 14 menyatakan bahwa : Materi muatan peraturan daerah

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>75</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara praktis menyusun dan merancang Perda (suatu kajian teoritis dan praktis disertai dengan manual)*, (Jakarta: Prenada Media Grup), h.65.

provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat materi sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan mahkama konstitusi dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat;

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau

---

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 10 ayat 1.

tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

Perancangan peraturan daerah harus selaras dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan memerhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kondisi masyarakat.

Muatan materi peraturan daerah, juga dapat memuat tentang ketentuan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda lain, sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>77</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh

---

<sup>77</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta), h. 38.

dan membahas dalam penelitian tersebut.<sup>78</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sumber datanya tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar bisa ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>79</sup>

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>80</sup>

## 2. Responden dan Informan

---

<sup>78</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2015), h. 39.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhieneka Cipta, 2007), h. 22.

<sup>80</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.



Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan adalah narasumber yang terkait dengan permasalahan Penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data.<sup>81</sup> Informan dalam penelitian ini adalah BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan). Responden di dalam penelitian ini adalah Indomart dan Alfamart yang terdata di BPMP Bandar Lampung.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber.<sup>82</sup> Narasumber dari penelitian ini adalah BPMP di Bandar Lampung.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data yang meliputi interview,

---

<sup>81</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhieneka Cipta, 2007) h. 62.

<sup>82</sup> V. Wiratna Sujarweni *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h. 73.

observasi serta dokumentasi. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan juga berupaya mengadakan analisis kualitatif. Secara rinci penjelasan mengenai beberapa prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

*a. Prosedur Interview*

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara awal dilakukan secara terstruktur dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam mengenai pandangan responden tentang Implementasi PP. Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> V. Wiratna Sujarweni *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 31.

## b. Prosedur Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu berupa faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi PP. Nomor 42 Tahun 2007, prosedur ini dimaksudkan untuk melengkapi prosedur pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan studi dokumentasi.<sup>84</sup>

## c. Prosedur Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>85</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,h. 32.

<sup>85</sup> *Ibid.*,h. 33.

yang akan di teliti setelah data tersebut di teliti.

- b. Rekonstruksi Data (*Reconstrukting*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang telah diperoleh agar lebih bermakna. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data dihasilkan dari konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan yaitu BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) dan Responden (Indomart dan Alfamart).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Miles dan Huberman, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (1992), h. 20.



## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

1. Profil dan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Bandar Lampung

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung merupakan suatu usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Pelembagaan sistem PTSP dilaksanakan oleh BPMP Kota Bandar Lampung, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan yang telah di sahkan sebagai Keputusan Walikota Bandar Lampung No:161.a/20/HK/2008.
- b. Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008 untuk mewujudkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, merubah citra aparatur, dan

menghilangkan kesan birokrasi. (perbedaan seragam dari seragam PNS biasa dimaksudkan untuk menghilangkan citra birokrasi pemerintah menuju citra pelayanan publik dan diusahakan setara dengan kompetensi pelayanan prima sesuai ISO9001).

- c. Membuat ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada.

Membuat loket pengaduan masyarakat, sebagai salah satu instrumen koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pada BPMP Kota Bandar Lampung maka terlihat adanya peningkatan kualitas layanan yaitu semakin cepatnya prosedur perizinan. Misalnya KRK dan IMB, jika pada instansi teknis sebelumnya (Dinas Tata Kota) memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, tapi setelah pengurusan izin dilakukan pada BPMP, hanya memakan waktu 30 (tigapuluh) hari kerja. SITU yang sebelumnya menghabiskan waktu 3 (tiga) minggu, di BPMP hanya 7 (tujuh) hari kerja (sesuai SOP BPMP), dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPMP Kota Bandar Lampung telah melakukan penyelenggaraan perizinan sesuai dengan amanat UU 25/2007 dan Permendagri 24/2006 yang

telah diganti dengan Permendagri 20/2008.

Sejalan dengan hal itu maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung yang mana salah satu lembaga tehnis yang dibentuk adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan dibentuknya sistem pelayanan terpadu satu pintu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjadan citra aparatur pemerintah, menyederhanakan birokrasi dan peningkatana mutu pelayanan kepada masyarakat serta tercapainya peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk melakukan inovasi, mengatur dan membuat berbagai kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar



merupakan pelayanan yang prima. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparatur pemerintah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda tunda lagi pelaksanaanya karena merupakan manifestasi dari aparatur pemerintahan selaku abdi masyarakat dan abdi negara, selain itu arus globalisasi dan persaingan pasar bebas serta tuntutan dunia bisnis yang semakin liberal menginginkan adanya berbagai kemudahan dalam melakukan investasi usaha khususnya dalam pengurusan seluruh perizinan yang dapat dilakukan dalam satu wadah (*onestop service*).

## 2. Visi Misi BPMP Kota Bandar Lampung

### a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”.

### b. Misi

- a. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik.
- b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

### c. Moto

“Memberikan Kepastian dan Kemudahan Dalam

Pelayanan”.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Bandar Lampung
  - a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.
  - b. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 2) Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 4) Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Susunan organisasi dinas penanaman modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- e) Pengkoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## 2) Sekertariat

- a) Sekertariat dipimpin oleh seseorang Sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- b) Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi urusan penyusunan program, urusan umum dan kepegawaian serta urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekertaris memiliki fungsi :
  - 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - 2. Pengelolaan urusan penyusunan program;
  - 3. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  - 4. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - 5. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
  - 6. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), sekertaris dibantu oleh :

1. Sub bagian program dan informasi;
  2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  3. Sub bagian keuangan dan aset;
- e) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Informasi Sub bagian Program memiliki tugas :

- 1) Menghimpun dan menyusun program kegiatan dan anggaran dinas;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
- 3) Menghimpun dan menyusun laporan kerja dinas;
- 4) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;

- 2) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan bagian umum dan kepegawaian;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset memiliki tugas :

- 1) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- 2) Melakukan pengelolaan administrasi dan aset;
- 3) Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- 4) Melakuka tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;

Bidang Penanaman Modal memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penanaman

Modal yang meliputi urusan pelayanan penanaman modal, urusan promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal, serta urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

## **B. Praktik Perizinan Waralaba di Bandar Lampung**

Mengingat adanya peraturan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2009 Pasal 2 butir (i) yang berbunyi, "Usaha Minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus) meter dari warung atau pedagang eceran yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan." Berkenaan dengan peraturan-peraturan di atas lokasi berdirinya minimarket Alfamaret khususnya di Jl.P.Tirtayasa Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Campang Jaya Beringin Kota Bandar Lampung yang sampai saat ini masih berdiri dan belum mendapat teguran ataupun sangsi dari pihak yang berwenang sesuai Pasal 16 ayat (1) dan Perda Nomor 17 tahun 2009 karena berdiri di dekat pasar tradisional dan para pelaku usaha kecil dengan jarak 100 meter yang jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber:

*"Iya kami mengetahui jika adanya Pasal tersebut, dan menurut kami terkait penerapan Pasal tersebut belum sepenuhnya diterapkan, buktinya masih banyak sekali*

*waralaba yang membangun didekat pasar tradisional, mungkin ada beberapa dampak positif dan negatif, dampak positifnya tentu menambah keuntungan bagi kami, dampak negatifnya mungkin warung-warung yang berada disekitar kami menjadi kurang ramai. Untuk perihal sanksi yang diberikan karena tidak mengimplementasikan Pasal tersebut kami belum tahu ya, yang kami tahu selagi kami disini tidak melanggar norma-norma yang ada ya tidak kenapa-kenapa, mungkin jika kami melanggar maka akan ditangani oleh pihak yang berwajib”.*<sup>87</sup>

Bisnis waralaba diperbolehkan selagi tidak melanggar norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber sebagai berikut:

*“Bisnis waralaba diperbolehkan selagi tidak melanggar norma yang ada, sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, dan apabila ada pelaku usaha bisnis waralaba yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku maka akan diberikan sanksi. Sanksinya yaitu akan diberikan teguran secara tertulis kepada pihak waralaba sampai*

---

<sup>87</sup> Alfian (Pegawai Alfa Mart), wawancara dengan penulis, tanggal 15 Juni 2020 di Bandar Lampung.



*tiga kali, jika pihak dari pelaku bisnis waralaba ini tidak mengindahkan teguran yang kami berikan maka akan kami tindak tegas”.<sup>88</sup>*

Setiap bisnis pasti memiliki suatu persaingan, tidak lain hal nya dengan bisnis waralaba tentu menimbulkan persaingan antara perusahaan waralaba dengan usaha-usaha kecil di sekitar perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber:

*“Iya benar, pasti akan menimbulkan suatu persaingan, tetapi yang pasti persaingan yang dilakukan secara sehat, saran kami kepada pemerintah daerah perlu lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian minimarket di sekitar pasar tradisional agar kepentingan usaha kecil dapat terlindungi”.<sup>89</sup>*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah harusnya kita taati dan kita jalani, tetapi fakta dilapangan telah menjawab bahwa Pasal tersebut belum diimplementasikan secara maksimal. Tetapi dengan adanya

---

<sup>88</sup> Dewi (Petugas BPMP Kota Bandar Lampung), wawancara dengan penulis, tanggal 15 Juni 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung.

<sup>89</sup> Burhan(Masyarakat), wawancara dengan penulis, tanggal 15 Juni 2020 di Bandar Lampung.

waralaba pasti akan ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya ada beberapa warung-warung kecil yang harus bersaing dengan waralaba, tetapi dampak positifnya adalah ketika ada waralaba/capital datang maka daerah tertentu tersebut pasti harga tanahnya akan naik, serta sarana prasarana akan mudah sampai.



## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Praktik Perizinan Waralaba di Bandar Lampung**

Waralaba atau *franchising* ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Lebih spesifik lagi, *franchising* adalah suatu konsep pemasaran. Dan dapat juga disebutkan bahwa *franchising* adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara pemasaran barang atau pun jasa dengan memberikan unsur kontrol tertentu kepada pemasok (*franchisor*) sebagai imbalan yang di peroleh oleh pihak yang mendapat hak (*franchisee*) untuk menggunakan nama dan merek franchisor. Menurut Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang-barang/jasa kepada pihak pelanggan akhir dengan pelaku waralaba (*franchisor*) yang nantinya akan memberikan hak kepada setiap individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan juga tata cara yang sebelumnya telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area-area tertentu.

Waralaba di Indonesia telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No 42 tahun 2007 tentang bsnis Waralaba. Beberapa peraturan lain yang juga mendukung tentang adanya kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M- DAG/PER/8/2008 tentangm Penyelenggaraan Waralaba
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Berkembangnya usaha waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart di sebuah kota khususnya Kota Bandar Lampung tentu disatu sisi akan membawakan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain keberadaan waralaba berbentuk mini market seperti Indomart dan Alfamart juga dapat membawa dampak negatif bagi iklim perekonomian di suatu daerah. Timbulnya

persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha di kota Bandar Lampung yang pada kenyataannya pada saat ini sudah terlihat adanya persaingan yang kurang sehat antara waralaba dengan pedagang kecil, khususnya pedagang tradisional dan kios-kios kecil.

Terkait dengan permasalahan diatas, kemudian pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang berisi waralaba dilarang membuka usaha dengan jarak kurang dari 250 meter sebagaimana peraturan tersebut adalah, mengingat adanya peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2 butir (i) yang berbunyi, "Usaha Minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus) meter dari warung atau pedagang eceran yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan."

Tetapi, fakta dilapangan yang terjadi masih banyak sekali Alfamart atau Indomart yang dibangun berdekatan dengan pasar-pasar tradisional. Salah satu contohnya adalah Alfamart khususnya di Jl.P.Tirtayasa Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Campang Jaya Beringin Kota Bandar Lampung yang sampai saat ini masih berdiri dan belum mendapat teguran ataupun sanksi dari pihak yang berwenang sesuai Pasal 16 ayat (1) dan Perda Nomor 17 Tahun 2009 karena berdri di dekat pasar tradisional dan

para pelaku usaha kecil dengan jarak 100 meter yang jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk ditingkatkandi era globalisasi dan industrialisasi ini. Kita melihat bahwa setiap semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh.

Di dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukumdan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukumdan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO. 36/M-DAG/PER/2007, SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa "suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya".

SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pengusaha perorangan maupun Firma, PT, CV, Koperasi, BUMN dan sebagainya. SIUP tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP. Apabila tidak memiliki SIUP itu artinya bisnis atau usaha yang dijalankan bentuknya ilegal. Adapun jenis-jenis SIUP antara lain:

1. SIUP Mikro, yaitu SIUP yang diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro dengan modal dan kekayaan tidak lebih Rp 50 Juta.
2. SIUP Kecil, yaitu SIUP yang harus dimiliki perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebanyak Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta. Namun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Menengah, yaitu SIUP yang harus dimiliki perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya Rp 500 Juta- Rp 10 Miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



4. SIUP Besar, yaitu SIUP yang mesti dimiliki perusahaan perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya lebih dari Rp 10 Miliar. Namun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP memiliki berbagai banyak fungsi bagi suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi SIUP secara umum. Di antaranya:

1. Sebagai bukti atau alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP.
2. Bisa sebagai syarat agar dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Yang terakhir, Perdagangan ekspor dan import bisa berjalan lancar jika pengusaha telah memiliki SIUP.

Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 25.000.000;
2. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000;
3. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang memiliki

modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 100.000.000.

Di bawah ini ada beberapa tahapan-tahapan dan persyaratan dalam pengurusan pembuatan serta perpanjangan SIUP:

1. Badan usaha mesti memiliki akta pendirian, domisili usahanya jelas. NPWP badan usaha mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang.
2. Pengusaha dapat mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan PTSP di mana lokasi usaha berada.
3. Mengisi formulir pendaftaran SIUP kemudian ditandatangani di atas materai Rp 6.000 oleh pemilik usaha.
4. Mengisi beberapa pernyataan yang dibutuhkan oleh permohonan SIUP.
5. Melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
  - a. Fotocopy KTP direktur
  - b. Fotocopy NPWP direktur
  - c. Fotocopy NPWP badan usaha
  - d. Fotocopy akte pendirian badan usaha dan persetujuan dari lembaga yang berwenang
  - e. Fotocopy domisili usaha
  - f. Neraca perusahaan
  - g. Pas Foto direktur 3x4 sebanyak 2 lembar.

Catatan: Biaya pembuatan SIUP berbeda di setiap daerah sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Terdapat beberapa manfaat jika telah memiliki SIUP bagi pemilik usaha antara lain:

1. Suatu usaha akan diakui oleh pemerintah sehingga usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum sesuai Undang-Undang. Dengan adanya perlindungan tersebut yakni agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar. Jika suatu saat terjadi sengketa, maka Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.
2. Apabila telah memiliki SIUP, maka seorang pengusaha akan dapat mudah melakukan pinjaman modal ke bank dan juga koperasi. Dan termasuk juga digunakan saat pengusaha tersebut mengikuti lelang atau tender.
3. Bagi bisnis ekspor-impor di haruskan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
4. Dari definisi SIUP yang menjelaskan legalitas usaha yang Anda jalankan, Jadi, otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas terpercaya karena diakui pemerintah. Dengan begitu maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak alfamart telah mengetahui dengan adanya peraturan tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah.
2. Adanya dampak positif dan negatif dengan dibangunnya waralaba didekat pasar-pasar tradisional atau warung-warung kecil. Dampak

negatifnya adalah banyak sekali warung-warung kecil yang harus bersaing dan mengeluarkan modal lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan waralaba tersebut. Tetapi, ada juga dampak positifnya adalah ketika ada waralaba/capital datang maka daerah tertentu tersebut pasti tingkat tanahnya atau harga tanah akan naik dan sarana prasarana akan mudah sampai.

3. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang larangan untuk membangun suatu perusahaan waralaba dengan jarak kurang dari 250 meter. Tetapi, faktanya pun ternyata ada yang membangun bahkan kurang dari 100 meter. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut belum diterapkan secara maksimal, bahkan sampai saat ini belum adanya sanksi atau teguran yang serius.

Terkait perizinan waralaba di Kota Bandar Lampung masih sering dijumpai, dan dinilai melanggar peraturan

yang ada. Seharusnya, pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih teliti lagi didalam memberikan izin waralaba untuk mendirikan suatu usaha.

## **B. Pandangan Politik Hukum Islam Mengenai Bisnis Waralaba di Bandar Lampung**

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sedangkan, politik hukum Islam adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum Islam yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, politik hukum Islam adalah arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama, atau kebijakan dasar penyelenggaraan Negara bidang hukum Islam yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Dalam sistem waralaba terdapat tiga komponen yaitu:

1. *Franchisor*, yaitu pihak yang memiliki system atau cara-cara dalam berbisnis.
2. *Franchisee*, yaitu pihak yang membeli franchise atau system dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor.
3. Franchise, yaitu system dan cara-cara bisnis itu sendiri, ini merupakan pengetahuan atau spesifikasi usaha dari franchisor yang dijual kepada franchise.

Waralaba dapat dilakukan baik dalam bentuk merek, format bisnis, maupun rahasia formula suatu produksi dagang. Jenis-jenis waralaba dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Waralaba Merek dan Produk Dagang

Waralaba dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu waralaba merek dagang dan produk. Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk royalty di muka, dan selanjutnya dia juga mendapat keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya, SPBU

menggunakan merek dagang PERTAMINA.

### 3. Waralaba Format Bisnis

Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain. Lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba jenis ini misalnya bisnis retail Mini Market Alfamart, Indomart dan lain-lain yang sejenis.

Berdasarkan negara asal, ada 2 jenis waralaba, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Waralaba Mancanegara

Merupakan waralaba yang berasal dari luar Indonesia. Waralaba mancanegara cenderung lebih disukai karena merek yang sudah sangat dikenal, serta harga yang rata-rata lebih mahal.

Contoh: McDonald, KFC, Miniso.

#### 2. Waralaba Domestik

Merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia dan

hasil dari pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan kalau kamu ingin membuka usaha yang pasti dikenal oleh masyarakat.

Contoh: Markobar, Alfamart, Campina, Apotek K24.

Perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*), di mana antara *franchisee* dan *francishor* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian) untuk memperoleh keuntungan bersama. Bisnis waralaba membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memberikan fasilitas kenyamanan, kebersihan dan harga yang bersaing serta produk yang berkualitas. Dalam bisnis waralaba diterapkan keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian. Perjanjian waralaba dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, dan terpenuhi pula prinsip-prinsip muamalah.

Meskipun kehadirannya membawa dampak terhadap usaha kecil yang ada di sekitarnya. Namun, persaingan yang tercipta adalah persaingan yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian minimarket di sekitar pasar tradisional agar kepentingan usaha kecil dapat terlindungi.



Terjalannya kerjasama antar pihak biasanya disahkan dengan sebuah kontrak atau kesepakatan. Dalam proses bekerja sama tersebut, biasanya pihak franchisor akan memberikan bimbingan dan arahan mengenai teknis usahanya, manajemen serta pemasaran produk. Sementara pihak franchisee harus membayar sejumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya. Jika menekuni usaha ini, kamu akan menemui istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Contoh Hak Kekayaan Intelektual adalah hak paten, rahasia dagang, desain logo, hak cipta dan lain-lain.

Untuk menentukan jenis waralaba apa yang sesuai, ada baiknya kamu mempertimbangkan hal-hal seperti lokasi, syarat dan ketentuan, sistem waralaba, produk, peluang keberhasilan dan biayanya. Atau jika kamu memilih untuk menjadi franchisor, ingatlah bahwa membangun brand tidak bisa dalam waktu singkat. Memutuskan brand bisa digunakan oleh orang lain juga bukan berarti modal akan bertambah dengan mudah. Franchisor perlu membina hubungan baik dengan setiap franchisee. Dengan begitu, bisnis juga kan bertahan lebih lama. Faktor keberhasilan sebuah waralaba adalah lamanya hubungan yang terjalin antara franchisor dan franchisee, bukan seberapa banyak produk yang terjual atau seberapa banyak outlet yang dibangun.

Tidak harus mengeluarkan modal yang besar untuk bisa mengembangkan usaha yang satu ini. Bahkan menjalankan usaha waralaba membuat kita tidak merasa terbebani dalam melakukannya karena dijalani secara bersama-sama. Kamu pun juga akan mendapatkan pelatihan. Bagi kamu yang ingin sukses dalam menjalani bisnis atau usaha waralaba berikut ini tips yang harus diterapkan:

### 1. Pilih Waralaba yang Mudah Dijalankan

Jika memang benar-benar baru terjun di dunia waralaba, sangat disarankan untuk memilih waralaba yang tidak terlalu sulit untuk dijalankan. Jangan terlalu paksakan untuk langsung melakukan yang sulit. Semakin mudah usaha franchise yang kamu lakukan, maka waktu dan pikiran juga tidak akan tersita terlalu banyak. Maka dari itu, pilihlah yang mudah dan juga praktis.

### 2. Pilih Harga Produknya yang Terjangkau

Setiap pebisnis maupun pengusaha tentu saja menginginkan bisnis yang dijalankannya bisa mendapatkan untung yang besar. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi yaitu melakukan pengorbanan tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal tersebut juga berlaku pada bisnis franchise.

Apabila ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin maka yang harus dilakukan yaitu dengan memilih waralaba yang menjual produk dengan harga terjangkau. Hal ini tentu saja bisa menekan modal sehingga laba yang didapatkan juga semakin banyak. Apalagi jika didukung dengan kualitas prima tentunya membuat usaha ini menjadi primadona di mata konsumen.

### 3. Carilah Waralaba yang Sering Dicari Konsumen

Untuk saat ini, usaha waralaba yang paling banyak diminati dan dicari oleh konsumen adalah usaha waralaba kuliner. Tentu saja hal bukan tanpa alasan, mengingat makanan merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam hidup manusia, jadi pasti selalu di cari dan akan selalu dicari sampai kapan pun. Di hampir setiap sudut kota bakal dengan mudah menemukan usaha. Tidak semua jenis produk atau barang disukai oleh banyak orang. kuliner ini. Contoh kuliner yang banyak digemari diantaranya mie ayam, nasi goreng, bakso, dan sate. Apabila ingin mencoba yang lain, bisa adakan riset atau survey terlebih dahulu untuk mengetahui produk atau barang apa saja yang sering dicari dan dibutuhkan oleh konsumen.

#### 4. Pilih Waralaba dengan Pelayanan yang Baik

Pelayanan dari pihak franchisor juga harus diperhatikan baik-baik. Jangan asal-asal dalam memilihnya. Kita harus pintar-pintar memilih jika ingin bergabung dengan pemilik waralaba. Pilihlah yang memberikan pelayanan yang terbaik, contohnya seperti komunikasi yang baik, adanya garansi produk atau barang, serta adanya pelatihan atau kursus yang masih ada kaitannya dengan usaha waralaba.

#### 5. Tentukan Lokasi yang Strategis

Dalam menjalankan sebuah usaha, tempat juga menjadi faktor penentu kesuksesan bisnis yang kamu jalankan. Pastikan kamu memilih tempat yang benar-benar strategis, dalam artian calon pembeli bisa mengetahui bahwa kamu menjalani sebuah usaha. Pilihlah lokasi yang kira-kira cukup ramai seperti dekat sekolah, kampus, perumahan, atau pinggir jalan raya. Selain itu sesuaikan juga dengan barang atau produk yang akan dijual. Sebagai contoh, jika menjual es krim maka pilih lokasi di mana orang-orang di sekitar sana memang gemar meminum es.

Hubungan kerjasama usaha Waralaba di antara kedua belah pihak, yaitu antara (Franchisor & Franchise) akan disahkan ke dalam sebuah pemberi waralaba

(Franchisor) dapat memberikan arahan maupun bimbingan tentang beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana secara teknis gambarang bisnis Waralaba tersebut.
2. Manajemen Waralaba.
3. Teknis dari segi penjualan serta pemasaran (marketing).
4. Produk-produk yang dijual kepada pihak penerima waralaba (Franchise).

Sebagai timbal baliknya, pihak penerima waralaba tersebut harus membayar sejumlah dana sebagaimana kesepakatan di antara kedua belah pihak yang sudah disepakati sebelumnya. Pada kurun waktu tertentu dan dengan beberapa kesepakatan yang telah tertera dalam sebuah perjanjian kerjasama, antara si pemilik dari merek produk atau Franchisor akan memberikan hak kepada para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang telah dia ciptakan tersebut.

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan atribut sebagai produsen seperti nama merek, prosedur dan juga sistem yang sebelumnya telah dijalankan oleh pihak Franchisor. Dalam bisnis waralaba, dikenal juga istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, diantaranya adalah seperti:

1. Hak paten.
2. Hak cipta
3. Rahasia dagang.
4. Desain logo dagang.
5. Nama dagang
6. Merek dagang.

Selain itu, pihak Franchisor juga telah mengatur segala perputaran usaha yang dilakukan dalam bisnis tersebut dari bagaimana tata cara penjualan, sistem manajemen yang nanti akan diterapkan, tata cara pendistribusian barang/jasa dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan definisi dari franchise dan pihak-pihak yang sudah berinteraksi dalam dunia bisnis franchise (waralaba) ini, semoga bisa bermanfaat dan salam sukses pebisnis waralaba Indonesia.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan untuk **Implementasi PP. No.42 Tahun 2007 Tentang Perizinan Waralaba Dalam Perspektif Politik Hukum Islam**, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi PP No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba di Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan ketetapannya. Terdapat beberapa pihak perusahaan waralaba yang mendirikan usahanya tidak sesuai dengan aturan yang ada di PP No. 42 Tahun 2007 dan peraturan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2009 Pasal 2 butir (i), yang berbunyi bahwa bisnis waralaba dilarang mendirikan usahanya dengan jarak radius 500 m dari pasar tradisional dan berjarak radius 250 m dari warung atau pedagang eceran yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba secara substansi tidak bertentangan, hanya saja pelaksanaan di lapangannya terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi nya.



- 2 Implementasi PP. No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba dalam perspektif politik hukum Islambahwa „*Urf* (adat istiadat) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu diperbolehkan. Salah satunya apabila para pihak waralaba mendirikan bisnisnya harus memperhatikan kepentingan lingkungan sekitarnya. Artinya, di masa yang akan datang jika siapa pun yang ingin mendirikan bisnis waralaba harus berlandaskan kepada perspektif hukum Islam *Al-„Urf*. Adat istiadat setempat jangan sampai diabaikan supaya ada keseimbangan juga tidak memonopoli dan tidak menghancurkan sesuai dengan implementasi itu. Impelementasi PP. No. 42 Tahun 2007 tentang Perizinan Waralaba tidak bertentangan dengan substansi hukum Islam. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangannya yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam perspektif hukum Islam di masa yang akan datang harus mengakomodasikan nilai-nilai kearifan local hukum adat sesuai dengan *Al-„Urf* sebagai landasan untuk pendirian walaraba.

## **B. Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung terutama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan harus mengambil tindakan tegas kepada franchisor/pihak usaha waralaba yang tidak mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Berdasarkan Pasal 16 PP. No. 2 Tahun 2007 bahwasannya Gubernur dan Walikota berhak menetapkan sanksi atau denda seperti pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, jika terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan waralaba. Jangan hanya diam diri saja, melihat para pihak waralaba ini merajalela mendirikan usahanya di tengah-tengah masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak waralaba agar dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam PP. No.42 Tahun 2007 dan mengikuti syariat agama Islam. Karena, mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Muslim. Sehingga, tidak merugikan kepentingan umat Islam dan umat yang lebih besar di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Abidin Ibn, *Radd al-Muhktar „ala add-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al- Fikr, tt, Jilid IV.

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, cet. 1, 2020.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhieneka Cipta, 2007.

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Asidieqy Hasbi, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Aqib Suminto Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoort Voor Inlandsche Zaken*. Jakarta: LP3IS, 1986.

Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Budiono Abdul Rahmat, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayu MediaPublishing, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesa Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Didik Sukriono, *Hukum konstitusi dan konsep otonomi*, Malang: Setara Pres.

Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinargrafika, 2012.

Ghufur Anshori Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca undang- undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah kedudukan dan Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Hardjowiguno Rooseno, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: BPHN, 1993.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara praktis menyusun dan merancang Perda (suatu kajian teoritis dan praktis disertai dengan manual)*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Hanafi Ahmad, *Penghantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Huberman dan Miles, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, 1992.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Manaf Abdul, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama Bandung: Mandar Maju, 2008.

M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, cet.1 Jakarta: LP3ES, 1998.

M. Yahya Harahap, *"Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi hukum Islam"*, Dalam cik hasan bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika.

Pipin Syahrifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan

Terpadu di Daerah.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers. Recharde Burton Simatumpang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Penanda Media, 2004.

Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta, 1987. Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media 2005.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, *Law in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Proklamasi dan CSIS, 1982. Sudjono



Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Study Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali Perss, 1983.

Sujarweni V. Wiratna *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Surbakti R, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Stijen Cornelis Van Huis and Theresia Dyah Wirastri, *Muslim Marriage Registration in Indonesia*.

Tegoeh Soejono, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 8.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan Pasal 10 ayat 1.

Wignjosoebroto Soctandyo, *Dari Hukum Kolonial  
ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik  
Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan  
peraturan perundang-undangan*, Jakarta:  
Grafindo Persada.

## **2. Jurnal**

Aturan tentang pencatatannya dan sahnyanya  
perkawinan dalam UU No.1/1974, Lihat  
kasus Kasus pencatatan perkawinan dalam  
Stijn Cornelis Van Huis and Theresia Dyah  
Wirastri, "Muslim Marriage Registration in  
Indonesia: Revised Marriage Registraton  
Laws Cannot Overcome Compliance  
Flaws", *Australian Journal Of Asian Law*. Vol.  
13, No,1, 2012.

Perdebatan seputar status hukum KHI dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia bisa dilihat misalnya, dalam Euis Nurlaela Wati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam:Amsterdam University Press, 2010).

lim Fahimah. "Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin". *Jurnal Wacana Hukum dan Keagamaan*.Vol. 5 No. 1, 2018.

Ismail Suny, *"Kedudukan Hukum Islam dalam dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia"*, dalam Amrullah Ahmad (Ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), h.131, lihat juga Juhaya.S. Praja *"Pengantar"*,dalam

Eddi Rudiana Arief (Ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perlembangan dan Pembentukan*, cet.2, (Bandung Remaja Rosdakarya, 1994).

### **3. Wawancara**

Burhan (masyarakat), wawancara dengan penulis,  
Bandar Lampung, 15 Juni 2020.

Dewi Kartika (Dinas BPMP), wawancara dengan  
penulis, Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Bandar Lampung, 15 Juni 2020.

Alfian (Pegawai Alfamart), wawancara dengan  
penulis, alfamart Bandar Lampung 15 juni  
2020.

### **4. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam.co.id](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam.co.id)  
diakses pada 12 Desember 2019.

<https://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>  
diakses pada 22 September 2020.





**Penerbit Arjasa Pratama**

Jl. P. Tirtayasa, gg. Andalas Way Kiri I No 1,  
Sukabumi, Bandar Lampung

Tlp : 0721-5640386

Email : [cvarjasapratama@gmail.com](mailto:cvarjasapratama@gmail.com)

[www.arjasapratama.com](http://www.arjasapratama.com)

